

Bab 6

Tantangan yang dihadapi orang tua, pendidik, dan masyarakat dalam memberikan pendidikan seksual yang tepat untuk anak.

Pendidikan seksual adalah salah satu elemen krusial dalam proses perkembangan anak yang sering kali diabaikan dalam konteks keluarga, sekolah, maupun komunitas. Dalam kenyataan sosial, topik ini masih sering dianggap tabu dan sensitif untuk dibicarakan secara terbuka, meskipun pemahaman yang benar tentang seksualitas sejak dini dapat berfungsi sebagai langkah awal untuk melindungi anak dari potensi kekerasan seksual, perilaku pelecehan, dan tindakan yang menyimpang.

Bab ini akan menganalisis secara mendalam berbagai rintangan yang dihadapi orang tua, pendidik, dan masyarakat dalam memberikan pendidikan seksual yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Tidak bisa dipungkiri, banyak di antara mereka yang masih merasakan kesulitan saat menyampaikan informasi seksual dengan cara yang edukatif dan informatif tanpa menimbulkan kebingungan. Selain itu, norma-norma sosial, stigma budaya, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat seringkali menghalangi terciptanya ruang diskusi yang sehat mengenai isu seksualitas, khususnya untuk anak-anak. Oleh karena itu, diskusi ini juga akan memaparkan berbagai solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Penekanan akan diberikan pada pentingnya kolaborasi antara orang tua, pendidik, dan lingkungan sosial dalam menciptakan ruang aman, terbuka, dan mendukung untuk mendidik anak mengenai tubuh mereka, batasan privasi, dan cara melindungi diri dari kemungkinan ancaman seksual. Pendidikan seksual yang sehat dan informatif bukan sekadar upaya perlindungan, namun juga merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang berpengetahuan, bertanggung jawab, dan mandiri.

Pendidikan seksual untuk anak-anak di usia dini perlu dimulai sedini mungkin dan berkembang sejalan dengan tahap tumbuh kembang anak. Pendidikan ini tidak hanya mencakup aspek biologis seksualitas, tetapi juga meliputi pertimbangan psikologis, budaya, etika, moral, dan hukum. Dalam pelaksanaan pendidikan seksual di tingkat anak usia dini, terdapat beberapa tantangan yang muncul, antara lain:

1. Tantangan yang dihadapi Orang Tua

a) Pengetahuan Orang Tua yang Terbatas

Banyak orang tua menganggap pendidikan seks adalah topik yang tabu dan terlalu sensitif untuk diajarkan kepada anak-anak. Selain itu, mereka sering merasa canggung ketika berbicara mengenai hal ini dengan anak-anak mereka.

b) Keterbatasan Metode

Salah satu hambatan utama adalah ketidakpahaman orang tua tentang cara mengajarkan seks dengan benar pada anak-anak. Mereka merasa ragu untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak, dan juga khawatir tidak bisa menyampaikannya dengan tepat.

c) Kesulitan Berkomunikasi dengan Anak

Orang tua kadang merasa bingung tentang topik yang seharusnya dibahas dan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif. Selain itu, beberapa orang tua merasa tidak nyaman mendiskusikan pendidikan seksual karena anak mereka mungkin belum sepenuhnya memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan seksualitas.

d) Dukungan Sosial yang Kurang

Komunitas dan lingkungan sekitar biasanya tidak memberikan dukungan yang memadai untuk pengajaran pendidikan seksual pada anak usia dini. Hal ini membuat orang tua merasa tidak nyaman saat menghadapi perilaku anak, terutama jika perilaku tersebut dianggap "tidak wajar" dalam norma masyarakat.

2. Tantangan yang dihadapi Pendidik

Menurut Diajeng Ayu Eka Fadilah dan Muthmainah, ada sejumlah tantangan signifikan yang dihadapi oleh pendidik dalam memberikan pendidikan seksual yang tepat bagi anak-anak prasekolah, khususnya dalam konteks pendidikan anak usia dini. Berikut adalah identifikasi tantangannya:

a) Kesulitan dalam mencari media yang efektif untuk menyampaikan materi sehingga anak dapat memahami dengan baik.

b) Para pendidik masih merasa bingung atau mengalami kesulitan dalam menemukan cara komunikasi yang tepat untuk menyampaikan konten, sehingga anak-anak bisa dengan mudah mempelajari pendidikan seks.

- c) Pendidik mengalami kekhawatiran bahwa pengajaran pendidikan seks dapat menyebabkan persepsi yang salah di benak anak.
- d) Beberapa pendidik masih melihat topik pendidikan seks sebagai sesuatu yang tabu untuk diajarkan.
- e) Pendidik khawatir tidak akan mampu menjawab pertanyaan anak-anak mengenai materi pendidikan seks.
- f) Sebagian Pendidik merasa kesulitan dalam menghubungkan topik pendidikan seks dengan materi belajar lainnya.
- g) Beberapa pendidik juga merasa bingung atau mengalami tantangan dalam menentukan informasi apa yang seharusnya disampaikan kepada anak-anak.
- h) Serta para pendidik juga merasa bahwa hambatan sebenarnya muncul dari orang dewasa di sekitar anak dalam memahami pentingnya pendidikan seks untuk anak-anak.

3. Tantangan yang dihadapi Masyarakat

a) Standar Sosial dan Budaya

Dalam masyarakat konservatif, pendidikan seksual seringkali dipandang sebagai sesuatu yang tidak pantas. Orang tua dan guru juga cenderung menghindari membicarakannya karena dianggap tidak pantas dan merasa tidak nyaman untuk berbicara tentang masalah seks dengan anak-anak.

b) Stigma dan Pandangan Negatif terhadap Pendidikan Seksual

Adanya stigma negatif dari banyak orang yang menolak diskusi tentang topik pendidikan seksual pada anak, karena menganggap bahwa pendidikan seksual sama dengan pornografi atau mendorong perilaku seksual bebas.

c) Kurangnya Sumber Pendidikan yang Ramah Anak dan Kontekstual

Banyak pembelajaran pendidikan seksual terlalu teknis atau tidak sesuai dengan budaya lokal, sehingga sulit diterima oleh masyarakat atau dipahami anak.

d) Minimnya Kolaborasi antara Sekolah, Keluarga, dan Komunitas

Pendidikan di Sekolah, keluarga, dan komunitas seringkali tidak bekerja sama dalam pendidikan seksual pada anak. Orang tua sering menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab mereka kepada sekolah karena mereka tidak tahu cara menjelaskan masalah seksual. Sekolah menghindari membahas masalah ini secara mendalam karena khawatir akan menimbulkan kontroversi dari orang tua atau karena tidak adanya kebijakan khusus. Tidak ada upaya yang dilakukan oleh komunitas atau lingkungan sekitar untuk menciptakan lingkungan aman atau kegiatan pendidikan yang mendukung pendidikan seksual.

Stigma, norma sosial, dan budaya yang sering kali menghambat diskusi terbuka tentang seksualitas di masyarakat.

- **Stigma Sosial**

Salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling parah dan perlu ditangani di Indonesia adalah kekerasan seksual terhadap anak. Angka kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, mencapai 15.820 kasus pada tahun 2023. Pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat umum telah menjadikan masalah ini sebagai masalah penting.

Mengingat dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan pada korban secara fisik dan psikologis, penanganan kasus ini memerlukan pendekatan yang terpadu dan menyeluruh. Oleh karena itu, kebijakan dan praktik evaluasi yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak sangat penting untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil tepat sasaran dan efektif.

Kendala utama dalam menangani kasus ini adalah keterbatasan sumber daya manusia. Banyak lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak kekurangan karyawan yang cukup untuk membantu korban kekerasan seksual. Hal ini menghambat proses pemulihan korban dan dapat mengakhiri kondisi psikologis mereka. Selain itu, fasilitas saat ini sering kali tidak memenuhi kebutuhan khusus anak – anak korban kekerasan seksual.

Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, Stigma sosial juga menjadi penghalang yang signifikan. Banyak korban takut untuk melapor karena khawatir akan tanggapan negatif dari masyarakat atau bahkan dari orang-orang terdekat mereka. Korban dapat memilih untuk menyembunyikan pengalaman traumatis mereka karena Stigma, yang menyebabkan banyak kasus tidak terungkap (Rahmi & Rassajani, 2023).

Tetapi terdapat masalah dalam penanganan kasus ini yaitu kurangnya koordinasi antar lembaga. Berbagai organisasi, termasuk polisi, lembaga perlindungan anak, rumah sakit, dan organisasi non – pemerintah, bertanggung jawab atas kasus kekerasan seksual pada anak. Meskipun demikian, lembaga – lembaga seringkali tidak jelas tentang apa yang harus mereka lakukan. Hal ini dapat menyebabkan proses penanganan kasus menjadi membingungkan dan memperlambat respon terhadap kebutuhan korban. Dalam situasi ini, sangat penting untuk memahami bahwa memerangi kekerasan seksual terhadap anak adalah tanggung jawab seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah atau lembaga tertentu.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi anak – anak dari kekerasan seksual, lebih banyak orang harus berani melaporkan kejadian kekerasan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan praktik penanganan kasus kekerasan seksual pada anak akan sangat membantu untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi berikutnya. Selain itu, tindakan penting lainnya untuk mencegah mengungkapkan seksual terhadap anak adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Sangat penting agar masyarakat memahami pentingnya melaporkan kekerasan seksual dan hak – hak anak. Kampanye ini harus menyasar orang tua, guru, dan anggota masyarakat lainnya. Pendidikan di sekolah adalah salah satu metode yang efektif. Mendidik anak-anak tentang batas – batas tubuh mereka dan apa itu mengungkapkan seksual sejak dini dapat membantu mereka mengenali tanda – tanda bahaya. Penelitian yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan bahwa memberikan pendidikan seksualitas yang efektif di sekolah-sekolah dapat mengurangi kemungkinan mengungkapkan seksualitas terhadap anak – anak. Selain itu, orang tua harus terlibat dalam kampanye ini karena mereka dapat membantu anak – anak mereka ketika mereka mengenali situasi berbahaya. Kesadaran Kesadaran kampanye juga harus melibatkan media untuk memberi tahu orang lain tentang cara melaporkan mengungkapkan seksual dan membuat saluran pengaduan yang mudah diakses. Diperkirakan lebih banyak orang akan berani melaporkan kekerasan seksual terhadap anak jika kesadaran masyarakat tentang masalah ini meningkat (Fauzan, 2024b).

Keputusan orang tua atau keluarga untuk melapor juga dapat dipengaruhi oleh stigma. Dalam beberapa situasi, keluarga mungkin memilih untuk menyelesaikan masalah secara internal atau melalui hukum adat daripada melalui jalur hukum formal. Hal ini biasanya disebabkan oleh keinginan untuk menjaga nama baik keluarga atau karena mereka tidak menyadari pentingnya pelaporan resmi. Akibatnya, banyak pelaku kekerasan seksual tidak

menerima hukuman yang sebanding dengan tindakan mereka, yang dapat menyebabkan impunitas di masyarakat (Ronjo et al., 2024) .

Peraturan perundang – undangan yang berbeda mengatur bagaimana pemerintah menangani kekerasan seksual pada anak. Salah satu yang paling penting adalah UU TPKS, yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, termasuk anak – anak. Kebijakan ini mencakup banyak hal, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Namun, banyak masalah yang dihadapi saat penerapan kebijakan ini secara praktis. Kebijakan yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan terhadap anak masih dipertanyakan. Studi tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap kebijakan di kalangan penegak hukum dan profesional lainnya menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual tidak ditangani dengan baik.

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaporan kasus kekerasan seksual pada anak adalah salah satu keberhasilan yang dapat dicatat dalam penanganan kasus seksual pada anak. Kampanye sosial dan pendidikan publik telah membuat orang tua dan masyarakat lebih memahami hak anak dan pentingnya melaporkan kekerasan seksual di komunitas dan sekolah. Ini telah menyebabkan peningkatan jumlah laporan kekerasan seksual pada anak. Hal ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat mengetahui adanya kasus kekerasan, mereka mulai bersuara dan mengambil tindakan. Organisasi seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) telah mencapai keberhasilan tambahan dalam memberikan bantuan dan pendampingan kepada korban. DP3A telah membuat strategi penanganan yang mencakup penerimaan laporan, penjangkauan korban, pemrosesan kasus, mediasi, dan bantuan medis dan psikologis. Sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih baik setelah trauma, korban mendapatkan perawatan medis dan dukungan psikologis dari profesional yang berpengalaman. Langkah pertama yang sangat penting dalam menangani kasus transmisi seksual pada anak adalah meningkatkan kolaborasi lembaga lintas . Berbagai organisasi, termasuk polisi, lembaga perlindungan anak, rumah sakit, dan organisasi non – pemerintah, berpartisipasi dalam menangani kasus ini. Namun, seringkali terjadi ketidakjelasan tentang siapa yang bertanggung jawab apa antara lembaga – lembaga tersebut. Hal ini dapat menyebabkan penanganan kasus menjadi lebih sulit dan kurang responsif terhadap kebutuhan korban (Brilianto et al., nd). Organisasi ini tidak selalu bekerja sama dengan baik, yang sering menyebabkan proses hukum yang lebih lama dan pemulihan korban yang tertunda. Ketidakjelasan dalam pembagian tugas dapat menyebabkan hilangnya informasi penting tentang suatu kasus, yang dapat menghambat penyidikan dan pemulihan

korban. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun sistem kerja sama yang lebih baik antara berbagai lembaga agar kasus kekerasan seksual pada anak dapat ditangani dengan lebih efisien. Membentuk forum atau jaringan kerja antar lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah salah satu cara untuk meningkatkan kerja yang sama. Forum ini memungkinkan orang untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dalam menangani kasus. Selain itu, setiap lembaga harus memiliki standar yang jelas untuk menjalankan prosedur standar operasional (SOP) untuk penanganan kasus.

Rekomendasi penting lainnya untuk meningkatkan kualitas perawatan kasus kekerasan seksual adalah pelatihan profesional terkait masalah tersebut. Banyak orang yang bekerja dalam penanganan kasus ini, seperti polisi, psikolog, pekerja sosial, dan tenaga medis, perlu mendapatkan pelatihan khusus. Pengetahuan tentang hak – hak anak, metode wawancara yang ramah anak, dan cara mengidentifikasi tanda – tanda trauma harus menjadi bagian dari pelatihan ini. Laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa banyak tenaga kerja tidak memiliki kemampuan untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak dengan sensitivitas yang diperlukan. Oleh karena itu, pelatihan rutin harus dilakukan untuk memastikan bahwa karyawan memiliki pengetahuan terbaru dan dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan korban (Al-Khusaeri et al., 2023).

- Norma Sosial:

Perilaku masyarakat terhadap seksualitas sangat dipengaruhi oleh norma sosial. Norma – norma ini biasanya berasal dari generasi ke generasi dan sering memandang seks sebagai sesuatu yang tidak boleh dibicarakan secara terbuka, terutama oleh perempuan dan anak muda.

Disebabkan oleh norma – norma ini, pendidikan seks hanya diberikan secara terbatas dan lebih menekankan aspek biologi semata. Meskipun demikian, membahas aspek sosial, emosional, dan psikologis seksualitas juga penting.

Menurut Calderone (dalam Suraji & Sofia, 2008), pendidikan seks adalah pelajaran yang membantu orang memahami kehidupan keluarga, menghormati diri sendiri, dan belajar bersosialisasi secara sehat dan bertanggung jawab secara seksual dan sosial. Sayangnya, sebagian orang di Indonesia masih percaya bahwa mengajarkan anak – anak tentang seks sejak dini dapat menyebabkan perilaku negatif karena dianggap akan membangkitkan rasa penasaran mereka. Akibatnya, pendidikan seksual masih dianggap tidak masuk akal dan

hanya boleh dibicarakan oleh orang dewasa. Padahal, dorongan seksual manusia mulai muncul sebelum seseorang memasuki usia dewasa, sejak masa pubertas.

Pendidikan seksualitas sejatinya bertujuan untuk mengajarkan keterampilan dan pengetahuan remaja agar tetap sehat dan menghindari perilaku seksual yang berisiko. Menurut Santoso (2020), masalah seperti pernikahan dini, kehamilan yang tidak diinginkan, dan penyakit menular seksual seringkali muncul secara tak terduga dalam kehidupan remaja. Ini terjadi seolah – olah mereka tidak mengetahui sebelumnya.

Remaja Indonesia saat ini mengalami pergeseran dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Mereka juga mengalami perubahan dalam norma, nilai, dan gaya hidup mereka karena perubahan ini, termasuk seksualitas mereka. Namun, masalah terbesar yang dihadapi orang tua saat mengajarkan pendidikan seksualitas kepada anak usia dini mereka adalah merasa tidak nyaman, percaya bahwa anak belum siap, dan tidak tahu bagaimana memberikan pendidikan tersebut. Namun, jika informasi yang tepat tersedia, komunikasi yang terbuka, dan peran ayah terlibat, pendidikan seksualitas akan lebih mudah diberikan sejak dini.

- Budaya

Seksualitas tidak boleh dibicarakan secara terbuka dalam budaya tradisional, menurut banyak orang. Pembicaraan tentang seks antara orang tua dan anak masih dianggap tabu bahkan dalam keluarga. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan, malu, dan kebingungan yang berpotensi membahayakan, seperti kehamilan remaja atau penyebaran infeksi seksual menular. Nurhayati (2016) menyatakan bahwa pandangan yang dianggap tabu tentang seksualitas dalam masyarakat Indonesia menghambat pendidikan seksual, yang seharusnya diberikan sejak dini, terutama oleh keluarga. Anggapan bahwa seksualitas adalah sesuatu yang “kotor” atau tidak pantas untuk dibicarakan secara terbuka dan tidak pantas. Selain itu, budaya sering menekankan peran gender yang kaku: laki – laki dianggap dominan, dan perempuan dianggap suci. Ini meningkatkan tekanan pada perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk menahan diri agar tidak membahas pengalaman atau kebutuhan seksual mereka. Dalam hal ini, Komnas Perempuan (2020) dan UNFPA Indonesia (2020) menekankan bahwa norma sosial dan budaya yang kuat menghambat percakapan terbuka tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi.

Selain itu, norma dan peran gender konvensional menyebabkan hierarki gender, yang membuat laki – laki heteroseksual memiliki dominasi dan hak istimewa tertinggi dalam

komunitas mereka, yang memungkinkan mereka mengungkapkan seksual kepada orang lain . Peran gender memandang seksual sebagai perilaku atau sikap sosio – seksual yang menyimpang karena keyakinan bahwa peran gender laki – laki adalah sebagai pelaku seks (sex agent) dan peran gender perempuan adalah sebagai obyek penerima seks (sex object) (Burn, 2019).

Selain itu, perspektif sosiokultural menyatakan bahwa keinginan untuk menghukum seseorang yang menyimpang atau menyimpang dari norma dan peran gender tradisional di lingkungannya dapat menyebabkan pemikiran seksual seksual (gender – non konforming) (Burn, 2019; Herrera et al., 2018). Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya pemikiran seksual di lingkungan termasuk penekanan pada ideologi maskulin yang tradisional, konformitas sosial terhadap tradisi maskulin tradisional, penerimaan sosial atas mitos dan kepercayaan yang terkait dengan pemahaman seksual, dan kurangnya empati sosial (Burn, 2019; Cardella dkk., 2016; Herrera dkk., 2018).

Sikap terkait pemikiran seksual dipengaruhi oleh peran sosial budaya, pendidikan, pengetahuan, dan usia. Keadaan atau konstruksi sosial budaya juga mempengaruhi sikap untuk mengungkapkan seksual (Merkin, 2012; Young & Hegarty, 2019). Dalam beberapa budaya, masyarakat percaya bahwa korban pemanggilan seksual adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemanggilan seksual itu sendiri, dan pelaku pemanggilan seksual dianggap hanya berasal dari laki – laki yang memiliki kondisi medis tertentu (Herrera dkk, 2018, Merkin, 2012). Selain itu, pemikiran seksual dipengaruhi oleh lingkungan keluarga atau orang tua serta kondisi demografis (Cardella dkk., 2016). Menurut perspektif konstruksi sosial budaya, reproduksi seksual dipengaruhi oleh stratifikasi sosial. Individu yang memiliki status sosial budaya yang lebih rendah, seperti status perkawinan, usia, tingkat pendidikan, ras, jenis kelamin, dan stereotip gender, cenderung lebih sering menjadi korban seksual terungkap (Merkin, 2012). Dalam kaitannya, French dan Raven (1959) mengembangkan teori kekuatan sosial. Teori ini mengatakan bahwa pelaku mengungkapkan seksual lebih cenderung bertindak dengan menggunakan kekuasaan koersif mereka. Ketika seseorang dengan status sosial atau peran sosial yang lebih rendah meminta sesuatu kepada orang yang memiliki kekuasaan sosial yang lebih tinggi, mereka merasa berhak dan memiliki legitimasi. (bawahan) untuk melakukan aktivitas seksual di dalamnya (Burn, 2019; Herrera dkk., 2018).

Solusi untuk mengatasi tantangan ini dan pentingnya peran orangtua serta pendidik dalam mendukung pendidikan seksual yang sehat dan informatif.

Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan dua cara, yaitu: tindakan preventif. Tindakan preventif dilakukan dengan melakukan penanggulangan sebelum terjadinya tindak pidana (Megayati, 2021). (a) memberikan penyuluhan kepada masyarakat; (b) memberikan perlindungan dan perhatian yang lebih besar kepada anak agar tidak menjadi pelaku tindak pidana atau korban tindak pidana; dan (c) meningkatkan pengamanan di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana. Menurut para ahli dan penegak hukum, upaya preventif dalam menangani tindak pidana anak antara lain: (a) memberikan nasihat atau arahan yang membangun; (b) mengajarkan keterampilan yang bermanfaat bagi anak; (d) membina perkembangan mental anak; (e) menyediakan tempat, sarana, atau wadah bagi anak untuk beraktivitas; (f) menjauhkan anak dari pengaruh yang tidak baik; (h) melakukan pengawasan terhadap lingkungan sosial anak; (i) pengawasan orang tua atau pendekatan secara langsung. Yang kedua, upaya represif, yaitu Tindakan pencegahan yang diambil setelah anak menjadi korban tindak pidana seksual meliputi: (a) melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana dan (b) menghukum pelaku atas tindakannya agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan menempatkan mereka di lembaga pemasyarakatan.

Menurut sejumlah media, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak saat ini sudah pada tingkat darurat. Negara, masyarakat, sekolah, dan keluarga harus bekerja sama untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. kekerasan seksual terhadap anak harus ditangani secara terpadu dan menyeluruh. Berikut pentingnya peran setiap pihak dalam upaya mengatasi kekerasan seksual pada anak;

1. Peran keluarga

Dalam hal melindungi anak-anak dari bahaya kekerasan seksual, orang tua memegang peranan penting. Setelah terjadinya kekerasan seksual, orang tua (bukan pelaku kekerasan) memainkan peran penting dalam membantu anak-anak beradaptasi dan pulih dari trauma. Hal yang dapat dilakukan oleh keluarga, yaitu dengan memberi mereka edukasi yang tepat mengenai batasan tubuh mereka dan pentingnya membela diri. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak:

- Pakaian yang terlalu terbuka sebaiknya tidak diberikan karena dapat mendorong terjadinya pelecehan seksual.

- Menanamkan rasa malu pada anak sejak usia dini.
- Ajari mereka untuk hanya menggunakan kamar mandi dan tidak membuka pakaian di depan umum.
- Jauhkan mereka dari media pornografi, termasuk film dan iklan.
- Anjurkan mereka untuk tidak mendekati orang asing atau menerima hadiah.

2. Peran masyarakat

Masyarakat memegang peranan penting dalam mengajarkan semua orang tentang risiko kekerasan seksual, cara mengenali tanda-tanda, dan cara menghentikannya. Program konseling dapat diselenggarakan oleh masyarakat untuk mendidik orang lain tentang pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Orang tua, pendidik, dan anak-anak itu sendiri harus menjadi fokus dari pengajaran ini.

3. Peran sekolah

Selain rumah, salah satu lingkungan sosial terpenting dalam kehidupan seorang anak adalah sekolah. Sekolah berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan pendidikan, juga membantu anak-anak mengembangkan karakter mereka, menerima dukungan emosional, dan menjaga kesehatan psikologis mereka. Sekolah memainkan peran penting dalam mengidentifikasi, menghentikan, dan mendukung korban kekerasan seksual terhadap anak-anak. Beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu memberikan dukungan psikologis kepada korban pelecehan seksual, layanan konseling diperlukan untuk membantu anak-anak yang mengalami pelecehan seksual mengatasi trauma dan kecemasan mereka. Konselor yang terlatih sering kali tersedia di sekolah untuk menawarkan dukungan emosional dan psikologis kepada anak-anak yang membutuhkan. Selain layanan konseling, lingkungan sekolah juga penting untuk memastikan bahwa siswa merasa aman dan diterima di lingkungannya. Guru kelas dan teman-teman dapat membantu anak-anak korban menjadi lebih merasa dan mengurangi keterasingan.

4. Peran hukum

Tidak diragukan lagi, negara memiliki peran terbesar dalam menangani kekerasan seksual pada anak karena telah "membiarkan" maraknya kekerasan semacam itu pada anak. Sebab, pada hakikatnya, negara dapat mempengaruhi seberapa siapnya orang, keluarga, dan masyarakat. Kesejahteraan penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah.

Kesimpulan

Pendidikan seksual pada anak usia dini merupakan aspek penting yang sering kali terhambat oleh berbagai tantangan, baik dari sisi orang tua, pendidik, maupun masyarakat. Tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam menyampaikan materi secara tepat. Dengan norma sosial dan budaya yang menganggap seksualitas sebagai hal tabu, serta minimnya dukungan lingkungan dalam membentuk ruang edukasi yang aman dan terbuka, mengakibatkan kasus kekerasan seksual tidak tertangani dengan baik. Banyak korban yang enggan melapor karena takut dikucilkan, dan lemahnya koordinasi antar lembaga membuat penanganan kasus menjadi lambat dan tidak efektif.

Solusi yang ditawarkan mencakup pendekatan preventif dan represif, peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi, serta keterlibatan aktif dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan seksual yang sehat, informatif, dan sesuai usia bukan hanya bentuk perlindungan, tetapi juga investasi untuk menciptakan generasi yang berpengetahuan, tangguh, dan bertanggung jawab secara sosial.

REFERENSI

- Ambodo, T., & Rochim, F. (2024). KONSEP GENDER Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), 74-86.
- Djunaidi, S. M., Rasyad, A., & Aisyah, E. N. (2025). Tantangan Orang Tua dalam Penerapan Pendidikan Seks Anak Usia Dini: Systematic Literature Review. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 8(1), 375-383.
- Fadilah, D. A. E., & Muthmainah. (2025). Strategi guru dalam mengajarkan pendidikan seks untuk anak dan kendalanya. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 9(1), 101–116. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v9i1.4975>
- Fauziyah Syarifatul Huriyah, Siti Lulu Ulfiyah, Sopi Masturoh, & Syifa Faujiyah. (2024). Strategi Menghadapi

- Firdaus, D. (2022). Pendidikan seks. Elibrary Unikom
- Hedo, D. J. P. K., Putri, S. I., & Kurniagung, P. P. (2021). Pengaruh Aspek Sosial Budaya terhadap Sikap Pelecehan Seksual. *Jurnal Psikologi*, 14(2), 233-245
- Husodo, T. (2017). Pendidikan seks sebagai pencegahan perilaku seksual menyimpang pada remaja.
- Komnas Perempuan. (2020). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan*.
<https://komnasperempuan.go.id>
- Nurhayati, I. (2016). *Tabu Seksualitas dan Pendidikan Seks di Indonesia*. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(2), 171-190.
- subakir, U. (2019). "Pendidikan Seksual untuk Anak Usia Dini: Antara Kebutuhan dan Tantangan." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2), 460–468.
- Tantangan Dalam Memberikan Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(1),
- UNFPA Indonesia. (2020). *Situasi Pendidikan Seksualitas Komprehensif di Indonesia*.
<https://indonesia.unfpa.org>
- Zakiah, R., Prabandari, Y. S., & Triratnawati, A. (2016). Tabu, hambatan budaya pendidikan seksualitas dini pada anak di Kota Dumai. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 32(9), 323-330.

Nama anggota:

Nur Abidatur Rohmah 24010684078

Uzlifatur Rohmah 24010684185

Fitri Linda Kusuma24010684190

Syahrani Setianigrum 24010684068

Novi Fauzia Rahmadina 24010684152